library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab Ketiga menjelaskan tentang rancang bangun penelitian yang meliputi penjelasan tentang tipe penelitian, unit analisis, populasi, teknik penarikan sampel, instrumen penelitian, pengumpulan data, teknik analisis, termasuk penggunaan alat statistik, identifikasi variabel dan definisi operasional serta pengukurannya.

Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis (*hypotesis testing*) yaitu penelitian yang menguji apakah hubungan yang diperkirakan memang terbukti dan jawaban atas pertanyaan penelitian telah diperoleh (Sekaran dan Bougie, 2010). Metode penelitian dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur untuk memberikan nilai kebenaran secara ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung pengujian hipotesis.

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dan penulisan disertasi ini berlangsung selama lima tahun, sejak tahun 2008 sampai dengan 2012 dan dilaksanakan di Indonesia, menggunakan *website* BUMN non-keuangan di Indonesia dan www.idx.co.id untuk memperoleh laporan tahunan perusahaan. Pemilihan periode penelitian sejak tahun 2008 sampai dengan 2012, dikarenakan pemerintah telah menerbitkan Undang undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang efektif berlaku sejak tahun 2013. Pemberlakuan UU OJK ini berdampak pada posisi Bapepam-

commit to user

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

LK yang semula berada di bawah kendali Kementrian Keuangan beralih menjadi di bawah kendali OJK.

B. Tipe Penelitian dan Unit Analisis

Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data menggunakan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 1999). Unit analisis adalah tingkat kumpulan data yang akan dianalisis (Sekaran dan Bougie, 2010). Unit analisis dalam penelitian ini menggunakan tingkatan kelompok (*group*), yaitu *board governance*.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah BUMN non-keuangan tahun 2008-2012. Penelitian ini menggunakan BUMN non-keuangan karena bagi perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi di Indonesia, *corporate governance*, termasuk di dalamnya *board governance*, telah diatur secara khusus melalui Pedoman GCG Perbankan Indonesia pada tahun 2004 dan Pedoman GCG Perasuransian Indonesia pada tahun 2006 (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Bank Indonesia telah memberikan peraturan tersendiri mengenai *corporate governance* untuk perusahaan perbankan melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP terkait Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Selain peraturan tersebut, terdapat perlakuan khusus bagi industri keuangan untuk mematuhi berbagai peraturan tersendiri untuk industri tersebut guna melindungi

commit to user

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

konsumen keuangan. Penelitian ini menggunakan tahun penelitian 2008-2012 karena pelaksanaan *corporate governance* pada tahun penelitian tersebut sudah dianggap berjalan dengan baik seiring dengan peraturan yang mengatur mengenai penerapan *corporate governance* pada BUMN di Indonesia telah diterbitkan sejak 2002. Tahun penelitian tersebut dipilih karena laporan tahunan BUMN pada tahun tersebut merupakan laporan tahunan terbaru yang dikeluarkan oleh BUMN di Indonesia pada saat penelitian ini dilaksanakan, sehingga penelitian ini menjadi relevan dengan kondisi saat ini. Populasi BUMN non-keuangan dari tahun 2008-2012 sebanyak 118 perusahaan.

Tabel 3.1.
Populasi

Tahun	Jumlah
2008	118
2009	118
2010	118
2011	118
2012	118
Total	590

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Hartono, 2005). Kriteria BUMN non-keuangan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah

1. BUMN non-keuangan yang menyediakan laporan tahunan di situs www.idx.co.id dan situs perusahaannya dari tahun 2008-2012.
2. BUMN non-keuangan yang menyediakan informasi tentang *board characteristics* dalam laporan tahunannya.

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan anggota Dewan Komisaris BUMN di Indonesia. Hasil wawancara kemudian direkam dan dibuat transkrip. Transkrip tersebut kemudian dijadikan bahan analisis hasil penelitian pada BAB IV.

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketaatan *mandatory disclosure* yang berfokus pada neraca dan laporan laba/rugi BUMN non-keuangan dari tahun 2008 sampai 2012. Abdullah (2013) menyatakan bahwa *mandatory disclosure* adalah jumlah informasi minimum yang ditetapkan oleh badan pengaturan standar akuntansi di mana perusahaan wajib untuk mengikutinya. Item pengungkapan laporan laba/rugi dan neraca dalam penelitian ini berbeda-beda (lihat Lampiran II dan III), tergantung dengan jenis industri masing-masing berdasarkan Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-02/PM/2002 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik untuk industri konstruksi, manufaktur, telekomunikasi, jalan tol, perkebunan, *real estate* dan transportasi serta Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-02/BL/2008 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi, dan Perbankan untuk industri pertambangan minyak dan gas bumi serta pertambangan umum.

commit to user

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-02/PM/2002 dan Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-02/BL/2008 sebagai peraturan yang ditetapkan Bapepam mengenai Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan aturan yang mewajibkan perusahaan mempublikasikan informasi penting yang perlu diketahui *stakeholder* perusahaan. Bapepam sebagai badan yang bertugas mengawasi pasar modal merancang peraturan ini ditujukan pada salah satu *stakeholder* utama yaitu investor dalam rangka mengambil keputusan investasinya. Item pengungkapan yang diatur tersebut menunjukan poin-poin penting yang seharusnya diperhatikan dan dipublikasikan perusahaan secara umum.

Penelitian ini menggunakan dua aturan Bapepam tersebut karena sampel penelitian ini adalah BUMN yang terdaftar di BEI dan BUMN yang tidak terdaftar di BEI. Ini dikarenakan jumlah BUMN yang terdaftar di BEI hanya 14 perusahaan. Disamping itu dalam penelitian ini dirancang untuk melihat perbedaan penerapan *mandatory disclosure* pada BUMN yang terdaftar pada BEI dan tidak.

Penelitian ini tidak menggunakan PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara karena dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa BUMN wajib mengungkapkan informasi penting dalam laporan tahunan dan laporan keuangan BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas, dan obyektif. Aturan ini tidak berisi poin-poin pengungkapan

commit to user

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

wajib yang harus dipublikasikan perusahaan, sehingga tidak dapat digunakan untuk menyusun kriteria *mandatory disclosure*.

Penelitian ini tidak menggunakan opini audit sebagai cerminan *mandatory disclosure* karena tujuan dari pelaksanaan audit adalah untuk melihat memastikan perusahaan telah menerapkan prinsip akuntansi yg berlaku umum dalam semua hal yang material. Pengungkapan wajib diperlukan tidak hanya untuk memastikan penerapan akuntansi perusahaan, namun juga untuk memastikan informasi keuangan lainnya yang terkait dengan kelangsungan perusahaan dipublikasikan.

Teknik pengukuran menggunakan teknik *scoring*, jika item tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan maka diberikan skor 1 dan skor 0 diberikan jika item tersebut tidak diungkapkan (Abdullah, 2013; Ahmed, 2007). Kuantitas ketaatan *mandatory disclosure* dapat diukur dengan *Unweighted Method*, yakni menjumlahkan skor pengungkapan untuk setiap *annual report* perusahaan tertentu pada tahun tertentu, kemudian membaginya dengan skor maksimal yang dapat dilakukan oleh perusahaan tertentu pada tahun tertentu (Setyadi *et al*. 2008). Metode ini dipilih karena dalam *Unweighted Method* setiap item dianggap memiliki bobot yang sama (dianggap sama penting), sedangkan jika menggunakan *Weighted Method* setiap item diberi bobot yang berbeda-beda (dianggap memiliki tingkat kepentingan yang berbeda-beda) (Tsalavoutas, Evans dan Smith, 2008). Tsalavoutas *et al*. (2008) menjelaskan bahwa kelemahan *Weighted Method* adalah memiliki tingkat subyektivitas tinggi dalam pemberian bobot untuk masing-masing item. Rumus perhitungan tingkat ketaatan pengungkapan adalah sebagai berikut:

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

$$\text{Tingkat Ketaatan } Mandatory\ Disclosure = \frac{\text{Skor Pengungkapan}}{\text{Skor Maksimal}} \text{ x } 100\%$$

2. Variabel Independen

a. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah pihak yang berfungsi sebagai pengawas aktivitas dan kinerja perusahaan serta sebagai penasihat direksi dalam memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *corporate governance* dengan baik (KNKG, 2006). Peran penting dalam melaksanakan *corporate governance* berada pada Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas aktivitas dan kinerja perusahaan serta sebagai penasihat direksi dalam memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *corporate covernance* dengan baik (KNKG, 2006). Jumlah anggota Dewan Komisaris mempengaruhi aktivitas pengendalian dan pengawasan (Andres *et al.* 2005). Abeysekera (2008) menyatakan bahwa ukuran Dewan Komisaris yang besar lebih efektif jika dibandingkan dengan ukuran Dewan Komisaris yang kecil. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Dewan Komisaris terdiri dari satu orang atau lebih. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah banyaknya anggota dalam Dewan Komisaris (Barako, 2007; Al-Akra *et al*. 2010; Nasution dan Setiawan, 2007; Anderson, Mansi, dan Reeb, 2004; Cheng dan Courtenay, 2004; UU No. 40 Tahun 2007).

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

b. Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Herwidayatmo, 2000). Keefektifan peran pengawasan oleh Dewan Komisaris didukung oleh keberadaan komisaris independen dalam Dewan Komisaris. KNKG (2006) mengatur agar jumlah anggota komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indikator yang digunakan penelitian ini sesuai dengan penelitian penelitian Eng dan Mak (2003), Suhardjanto dan Afni (2009), Suhardjanto dan Miranti (2009), Huafang dan Jianguo (2007), Cerbioni dan Parbonetti (2007), Hossain (2008), serta Suhardjanto dan Dewi (2011), yaitu:

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\Sigma \text{ Komisaris Independen}}{\Sigma \text{ Anggota Dewan Komisaris}} \text{ x } 100\%$$

c. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Jumlah rapat Dewan Komisaris merupakan rapat yang dilakukan antara Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan selama satu tahun. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, rapat Dewan Komisaris harus diadakan secara berkala, yaitu pada prinsipnya sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan, tergantung sifat khusus BUMN. Jumlah rapat

commit to user

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

yang diselenggarakan Dewan Komisaris akan meningkatkan kinerja perusahaan (Vafeas, 1999) karena rapat Dewan Komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi diantara anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen (Muntoro, 2005). Indikator yang digunakan penelitian ini adalah jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam waktu satu tahun (Carcello, Hermanson, Neal, dan Riley Jr, 2000; Brick dan Chidambaran, 2007; Cety dan Suhardjanto, 2010; Ettredge *et al*. 2010; Allegrini dan Greco, 2011).

d. Latar Belakang Pendidikan Anggota Dewan Komisaris

Kusumastuti *et al*. (2007) menyatakan bahwa anggota dewan yang memiliki latar pendidikan ekonomi dan bisnis memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengambil keputusan bisnis. Pengetahuan di bidang ekonomi dan bisnis membuat Dewan Komisaris lebih memahami pentingnya pengungkapan bagi perusahaan maupun *stakeholders*, sehingga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang memadai. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase anggota Dewan Komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi/bisnis dibanding jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris, (Kusumastuti *et al*., 2007; Amran dan Ahmad, 2011; Minton, Taillard dan Williamson, 2011; Chemmanur dan Paeglis, 2004; Jeanjean dan Stolowy, 2009; Ness *et al*., 2010).

$$\text{Proporsi LBPDK} = \frac{\sum \text{Komisaris Berlatar Belakang Pendidikan Eko/Bis}}{\sum \text{Komisaris}} x100\%$$

commit to user

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

e. Pengalaman Internasional Anggota Dewan Komisaris

Pengalaman internasional anggota Dewan Komisaris dapat meningkatkan kapasitas perusahaan untuk menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian lingkungan internasional karena meningkatnya pengetahuan yang dimiliki oleh Dewan Komisaris (Horner, 2006). Peningkatan pengetahuan tentang strategi pasar dan lingkungan internasional yang dimiliki oleh Dewan Komisaris lebih memahami pentingnya pengungkapan. Penelitian Sommer (2012) menggunakan indikator jumlah tahun pengalaman internasional yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris. Gantenbein dan Volonte (2011) mengukur pengalaman internasional dalam penelitiannya dengan membagi jumlah anggota Dewan Komisaris yang memiliki pengalaman internasional dengan jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Pengalaman internasional dilihat dari pengalaman anggota. Dewan Komisaris pada perusahaan luar negeri, perusahaan multinasional, dan keikutsertaan dalam organisasi internasional. Indikator dalam penelitian ini menggabungkan dan memodifikasi indikator yang digunakan oleh Sommer (2012) serta Gantenbein dan Volonte (2011) sehingga menjadi rata-rata jumlah tahun pengalaman internasional yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris.

f. Pengalaman Anggota Dewan Komisaris sebagai Direktur Utama

Anderson dan Zhao (2009) menyatakan bahwa Dewan Komisaris yang memiliki pengalaman di berbagai posisi memberikan keuntungan bagi perusahaan karena ilmu dan wawasan yang mereka miliki. Pengetahuan dan wawasan ini membuat pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menjadi lebih

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

efektif, di mana salah satu pengawasan yang dilakukan adalah dalam proses pelaporan keuangan perusahaan (Chtourou *et al*. 2001).

Indikator yang digunakan dalam beberapa penelitian terdahulu antara lain: rata-rata jumlah tahun pengalaman yang dimiliki Dewan Komisaris (Johari *et al*. 2008); rata-rata jumlah anggota yang memiliki pengalaman sebagai wakil direktur utama dan direktur utama (Chemmanur dan Paeglis, 2004); lamanya masa jabatan sebagai CEO (Adams *et al*., 2005; Anderson *et al*., 2009; Berezinets *et al*., 2011); rata-rata jumlah tahun menjabat sebagai *board of director* (Ness *et al*., 2010); rata-rata jumlah anggota Dewan Komisaris yang memiliki pengalaman sebagai CEO (Gantenbein dan Volonte, 2011). Penelitian ini menggunakan indikator yang menggabungkan dan memodifikasi indikator penelitian-penelitian terdahulu di atas sehingga menjadi rata-rata jumlah tahun pengalaman sebagai Direktur Utama yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris.

g. Pengetahuan Industri Anggota Dewan Komisaris

Meyerinck *et al*. (2012) menyatakan bahwa pengetahuan industri relevan dengan fungsi Dewan Komisaris sebagai dewan pengawas. Pengetahuan industri yang dimiliki komisaris ini juga membuat pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efektif (Hau dan Thum, 2009). Penelitian Chemmanur dan Paeglis (2004) menggunakan indikator rata-rata jumlah tahun pengalaman (masa jabatan) yang dimiliki oleh tim manajemen. Indikator yang digunakan dalam penelitian Sommer (2012) adalah jumlah tahun pengalaman yang dimiliki oleh Dewan Komisaris. Ness *et al*. (2010) mengukur dengan menghitung persentase Dewan Komisaris yang pernah bekerja di industri tertentu dibagi jumlah anggota Dewan Komisaris.

commit to user

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

Penelitian ini menggunakan indikator yang mengacu pada indikator penelitian Chemmanur dan Paeglis (2004), Sommer (2012) serta Ness *et al*. (2010), namun dimodifikasi menjadi rata-rata jumlah tahun pengalaman industri yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris. Pengetahuan industri dilihat dari pengalaman anggota Dewan Komisaris pada berbagai perusahaan dalam industri yang sama dengan perusahaan di mana saat ini anggota Dewan Komisaris tersebut menjabat dan pengalaman anggota Dewan Komisaris pada jabatan lain di perusahaan dimana saat ini anggota Dewan Komisaris tersebut menjabat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis jenis data, yaitu:

1. Data sekunder, berupa *mandatory disclosure* BUMN non-keuangan dan karaktetistik *board governance*. Data sekunder diambil dari laporan tahunan perusahaan dari tahun 2008—2012. Laporan tahunan dipilih karena memiliki kredibilitas yang tinggi (Zeghal dan Ahmed, 1999) dan digunakan oleh sejumlah *stakeholders* sebagai sumber utama informasi (Deegan dan Rankin, 1997) baik informasi keuangan dan non-keuangan. Data sekunder yang dikumpulkan diperoleh dari situs www.idx.co.id dan dari situs masing-masing perusahaan.
2. Wawancara, penelitian ini juga menggunakan wawancara sebagai bahan analisis hasil penelitian. Menurut Fox (2006) wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan komunikasi verbal antara peneliti dan

commit to user

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

partisipan atau responden. Jenis wawancara menurut Fox (2006) adalah (a) wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan peneliti dengan cara mengajukan pertanyaan yang sama pada tiap responden, (b) wawancara non terstruktur, yaitu teknik interview yang tujuannya adalah untuk berdikusi mengenai sebuah topik yang spesifik, dengan jumlah responden yang terbatas, (c) wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan pedoman pertanyaan, namun ditanyakan lepas dengan cara meminta pendapat. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Teknik ini lebih sesuai karena dapat mengungkap persepsi dan opini responden mengenai suatu isu. Dalam teknik ini peneliti mengembangkan dan menggunakan *interview guide*. *Interview guide* merupakan daftar pertanyaan dan topik yang perlu diungkapkan dalam wawancara, biasanya dalam urutan tertentu (Cohen dan Crabtree, 2006). Daftar pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah semakin banyak anggota Dewan Komisaris berpengaruh terhadap ketaatan pengungkapan wajib?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah jumlah Komisaris Independen berpengaruh terhadap ketaatan pengungkapan wajib?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah jumlah rapat Dewan Komisaris berpengaruh terhadap ketaatan pengungkapan wajib?
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah latar belakang pendidikan bisnis anggota Dewan Komisaris berpengaruh terhadap ketaatan pengungkapan wajib?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengalaman internasional anggota Dewan Komisaris berpengaruh terhadap ketaatan pengungkapan wajib?
6. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengalaman Dewan Komisaris sebagai Direktur Utama berpengaruh terhadap ketaatan pengungkapan wajib?
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengetahuan industri anggota Dewan Komisaris berpengaruh terhadap ketaatan pengungkapan wajib?

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

Wawancara dilakukan dalam rangka memperoleh keyakinan peneliti mengenai praktik *board governance* terhadap ketaatan *mandatory disclosure* pada BUMN di Indonesia. Wawancara ini diharapkan dapat mengkonfirmasi hasil pengujian statistik. Langkah yang ditempuh untuk melaksanakan interview terstruktur dalam rangka meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, meliputi (1) memperoleh informasi dengan tepat dari Komisaris, meliputi nama, alamat, nomor telepon dan data detail lainnya, (2) memastikan responden dapat disurvey, (3) mengirimkan permintaan wawancara, (4) melaksanakan interview, (5) menjalin kontak dengan responden (McNamara, 2006).

Mekanisme wawancara menurut menurut Fox (2006) dapat dilakukan dalam bentuk (a) wawancara *face-to-face*, yaitu wawancara yang dilakukan dalam pertemuan langsung peneliti dengan responden, (b) wawancara via telepon/video, wawancara ini dapat dilakukan apabila peneliti terkendala dalam melaksanakan wawancara *face-to-face*. Penelitian ini direncanakan untuk menggunakan wawancara *face-to-face*, namun demikian tidak seluruh responden dapat diwawancarai secara langsung. Karena kesulitan peneliti untuk bertemu langsung dengan Komisaris BUMN maka wawancara dilakukan via telepon. Peneliti telah menghubungi Komisaris untuk mengatur jadwal pertemuan, namun demikian Wawancara direncanakan pada sepuluh Komisaris BUMN. Karena kendala waktu dan kesibukan Komisaris, hanya tujuh orang Komisaris yang terlaksana terhadap BUMN *listing* dan *non-listing* di Indonesia. Hasil wawancara dilaksanakan melalui telepon dan

commit to user

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

direkam kemudian dibuat suatu transkrip yang digunakan sebagai bahan analisis hasil penelitian. Pertanyaan dalam wawancara umumnya berkisar pada daftar pertanyaan dalam *interview guide*, dengan pertanyaan lain yang muncul dari dialog antara pewawancara dan terwawancara (Dicicco-Bloom dan Crabtree, 2006).

F. Teknik dan Instrumen untuk Mengumpulkan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi *mandatory disclosure* yang dilakukan perusahaan dalam laporan keuangan yang meliputi neraca dan laporan laba rugi. Proses pengukuran *mandatory disclosure* dilaksanakan oleh tiga kelompok di mana di dalam masing-masing kelompok terdapat tiga sarjana akuntansi, dengan demikian terdapat sembilan orang yang melakukan penilaian atas pengungkapan yang dilakukan oleh BUMN non-keuangan dalam laporan keuangannya. Masing-masing kelompok yang telah melakukan *entry* data untuk setiap laporan keuangan, dilakukan proses perbandingan hasil antar kelompok atas hasil pengukuran *mandatory disclosure*.

Apabila terdapat ketidaksamaan atas hasil pengukuran item *mandatory disclosure* dari masing-masing kelompok, dilakukan diskusi antara sembilan orang tersebut dan peneliti untuk menentukan pengukuran item *mandatory disclosure* yang tepat. Proses pengukuran *mandatory disclosure* ini menggunakan aplikasi formulir Microsoft Excel yang tidak memungkinkan terjadinya pengisian ganda atau kesalahan dalam memasukkan data *mandatory disclosure*. Data

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

karakteristik *board governance* diperoleh melalui pengungkapan perusahaan dalam *annual report*.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis dan uji beda. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS *release* 21.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif terdiri dari penghitungan *mean*, standar deviasi, maksimum, dan minimum. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data (Ghozali, 2010).

2. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji pengaruh antara variabel independen dan dependen dalam penelitian ini digunakan pengujian regresi. Uji regresi mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan independen (Ghozali, 2010). Persamaan regresi berganda untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$$MD = \alpha + \beta_1 BSIZE + \beta_2 PROP_KOMIND + \beta_3 RPTDEKOM + \beta_4 LBPDK + \beta_5 INTL + \beta_6 CEOEX + \beta_7 INDKN + e$$

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

Tabel 3.2
Keterangan Persamaan Regresi Berganda

Simbol	Keterangan
MD	Tingkat Ketaatan *Mandatory disclosure*
BSIZE	Ukuran Dewan Komisaris
PROP_KOMIND	Proporsi komisaris independen
RPTDEKOM	Jumlah rapat Dewan Komisaris
LBPDK	Latar belakang pendidikan anggota Dewan Komisaris
INTL	Pengalaman Internasional Anggota Dewan Komisaris
CEOEX	Pengalaman Anggota Dewan Komisaris sebagai Direktur Utama
INDKN	Pengetahuan Industri Anggota Dewan Komisaris
A	Konstanta
β	Koefisien regresi
e	*Error*

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit*-nya. Secara statistik, *goodness of fit* suatu model dapat diukur dari nilai koefisien determinasi (R^2), nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik dikatakan signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah di mana H_0 ditolak), sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah di mana H_0 diterima (Ghozali, 2010).

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Koefisien determinasi digunakan untuk menguji *goodness of fit* model regresi. Nilai koefisien determinasi (R^2) dilihat pada hasil pengujian regresi linier berganda untuk variabel independen terhadap variabel dependennya. Jumlah variabel independen lebih dari dua, lebih baik menggunakan koefisien determinasi yang telah disesuaikan yaitu *adjusted* R^2 (Ghozali, 2010).

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

b. Nilai F

Merupakan pengujian untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2010). Dengan pengujian ini dapat diketahui apakah ukuran Dewan Komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat Dewan Komisaris, latar belakang pendidikan anggota Dewan Komisaris, pengalaman internasional anggota Dewan Komisaris, pengalaman anggota Dewan Komisaris sebagai Direktur Utama, dan pengetahuan industri anggota Dewan Komisaris berpengaruh secara simultan terhadap ketaatan *mandatory disclosure*.

c. Nilai t

Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan nilai t (Ghozali, 2010). Nilai t dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Variabel independen (ukuran Dewan Komisaris, proporsi Komisaris independen, jumlah rapat Dewan Komisaris, latar belakang pendidikan anggota Dewan Komisaris, pengalaman internasional anggota Dewan Komisaris, pengalaman anggota Dewan Komisaris sebagai Direktur Utama, dan pengetahuan industri anggota Dewan Komisaris dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (ketaatan *mandatory disclosure*) apabila nilai signifikan *(p-value)* lebih kecil dari 5,000%. Dengan demikian, H_1, H_2, H_3, H_4, H_5, H_6 dan H_7 diterima apabila nilai signifikan *(p-value)* lebih kecil dari 5%.

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

3. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian regresi berganda dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya efisien (Gujarati, 2003). Uji asumsi klasik sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2010). Hasil pengujian data dilakukan dengan menguji Kolmogorov-Sminorv. Kriteria pengujian apabila *p-value* > 0,05 maka data berdistribusi normal, sedangkan apabila *p-value* < 0,05 data tidak berdistribusi normal. Hal ini didukung juga dengan tampilan grafik histogram dan normal *probability plot*.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah masalah yang sering muncul dalam analisis regresi terjadi, yaitu di mana terdapat korelasi yang tinggi antar dua atau lebih variabel independen (Ghozali, 2010). Pengujian dilakukan dengan menggunakan toleransi *value* VIF (*variance inflation factor*). Jika *tolerance value* > 0,1 dan VIF < 10, maka tidak terjadi multikolonieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t–1 (Ghozali, 2010). Autokorelasi dalam model analisis regresi digunakan cara pengujian statistik *Runs Test*.

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2010). Heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan grafik *scatterplot*. Titik pada grafik *scatterplot* yang terbentuk harus menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Bila kondisi ini terpenuhi maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2010). Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini juga menggunakan *Uji White*.

4. Uji Beda

Uji beda dilakukan dalam penelitian ini untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda (Ghozali, 2010). Uji beda dilakukan dengan uji beda *t-test*. Uji beda *t-test* dilakukan dengan membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar *error* dari perbedaan rata-rata dua sampel (Ghozali, 2010). Uji beda dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan secara signifikan antara *mandatory disclosure* perusahaan BUMN non-keuangan yang *listing* dan *non-listing*, pada perusahaan BUMN non-keuangan *size* besar dan *size* kecil, serta pada neraca dan laporan laba/rugi.

commit to user